



Badan Reintegrasi-Damai Aceh (BRA)

Kompleks Taman Ratu Safiatuddin No.1, Banda Aceh
Telp/Fax: (0651) 755 1604/05

Press Release

BRA Hentikan Sementara Penggunaan Dana Reintegrasi 2007

Badan Reintegrasi-Damai Aceh (BRA) terhitung sejak tanggal 24 Mei 2007 sampai waktu yang akan ditentukan kemudian, menghentikan sementara waktu penggunaan dana reintegrasi dari anggaran tahun 2007 yang saat ini sedang dalam proses pencairan dari pemerintah pusat.

Penghentian sementara penggunaan dana tersebut dilakukan berdasarkan temuan lapangan dari tim BRA Pusat pada akhir Mei 2007 lalu, saat melakukan tinjauan ke berbagai daerah serta hasil konsultasi dengan seluruh anggota BRA wilayah pada waktu berlangsung Rapat Kerja (Raker) BRA/PPK tanggal 16 Mei 2007 di Pendapa Gubernur Aceh, untuk mengecek realisasi penyaluran dana reintegrasi tahun 2006.

Tim BRA Pusat yang dipimpin langsung Ketua Harian BRA, Muhammad Nur Djuli, didampingi Penasihat BRA Azwar Abubakar, Wakil Ketua Badan Pelaksana BRA Dawan Gayo, anggota Forum Bersama Pendukung Perdamaian Aceh (Forbes Damai) Faisal Ridha, dan sejumlah anggota tim lainnya dari Badan Narasumber Damai Aceh, saat melakukan kunjungan ke Aceh Selatan (yang dilanjutkan dengan kunjungan Ketua Harian BRA ke Lhokseumawe dan Bireuen) menemukan beberapa fakta.

Pertama, adanya kesimpangsiuran dalam kepengurusan BRA di tingkat pusat dan kabupaten/kota. Pengurus BRA Pusat diangkat oleh Gubernur Aceh berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur, sedangkan pengurus BRA di kabupaten/kota diangkat berdasarkan SK bupati/walikota masing-masing daerah. Kondisi ini menimbulkan adanya dualisme tanggung jawab para pengurus BRA di kabupaten/kota, yakni tanggung jawab kepada bupati/walikota yang mengangkatnya serta kepada Ketua Harian BRA di Banda Aceh, karena BRA kabupaten/kota merupakan bagian yang tak terpisahkan dari BRA provinsi. Dalam waktu dekat, pimpinan BRA akan

mengeluarkan kebijakan baru mengenai kepengurusan BRA di tingkat kabupaten/kota, setelah berkonsultasi dengan para bupati/walikota terutama menyangkut rencana standarisasi BRA kabupaten/kota secara keseluruhan.

Kedua, masih banyak korban konflik yang tidak mendapat bantuan. Jumlah korban konflik terus bertambah. Masing-masing pihak seperti Komite Peralihan Aceh (KPA), BRA, dan lembaga lain mempunyai data korban sesuai versinya masing-masing. Karena itu, BRA akan mengumpulkan semua data yang ada dari berbagai pihak dan menerima data baru dari organisasi maupun individu untuk dijadikan sebuah database tunggal yang baru.

Masalah ketiga yang cukup serius adalah penyaluran dana reintegrasi yang tidak tepat sasaran. Hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, dana reintegrasi tahun anggaran 2006 yang seharusnya diberikan kepada korban konflik, dialokasikan untuk program pembangunan desa/kecamatan bekerjasama dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dari Bank Dunia. Akibatnya, sebagian dana reintegrasi terambil untuk program lain di luar urusan korban konflik. Namun perlu ditekankan bahwa penggunaan dana reintegrasi untuk kegiatan di luar kepentingan korban konflik, bukan kesalahan pihak PPK/Bank Dunia tetapi kekeliruan kebijakan di pihak BRA Pusat sendiri.

Untuk meluruskan kembali tujuan penyaluran dana reintegrasi itu, Ketua Harian BRA setelah berkonsultasi dengan pengurus lainnya, memutuskan: *Pertama*, akan meninjau kembali dan membicarakan format baru pola kerjasama BRA dengan PPK/Bank Dunia. *Kedua*, menghentikan sementara penggunaan dana reintegrasi yang berasal dari anggaran tahun 2007.

Meski demikian, penyaluran dana reintegrasi yang berasal dari anggaran tahun 2006 tetap dilanjutkan terutama untuk administrasi, gaji dan operasional pengurus BRA, serta untuk dana kesehatan korban konflik.

Sambil menunggu keputusan baru mengenai penggunaan dana reintegrasi tahun 2007, BRA juga akan mengeluarkan semacam buku petunjuk tentang program reintegrasi di Aceh untuk para pengurus BRA di kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk menghindari terulangnya kesalahan-kesalahan penggunaan dana reintegrasi di masa depan.

Sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman Damai antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dana reintegrasi yang disalurkan pemerintah pusat kepada Pemerintah Aceh merupakan kompensasi untuk para mantan kombatan GAM, tapol/napol, dan masyarakat sipil korban konflik lainnya.

Dana reintegrasi tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN P) yang telah dikucurkan pemerintah pusat pada tahun 2005 sebesar Rp 200 miliar, dan tahun 2006 sebesar 593,8 miliar. Sedangkan alokasi dana reintegrasi untuk tahun 2007 sebesar Rp 700 miliar.

Pencairan dana reintegrasi tahun 2007 dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp 250 miliar. Saat ini telah diotorisasi dan tinggal dicairkan dalam waktu dekat ini. Tahap kedua sebesar Rp 450 miliar telah mendapat persetujuan dari BAPPENAS.

Pengurus BRA mengharapkan pelaksanaan reintegrasi ke depan berlangsung lebih transparan dan bertanggung jawab. Karena itu, masyarakat terutama korban konflik, diminta untuk ikut mengawasi pelaksanaan program reintegrasi dan melaporkannya apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan.

Banda Aceh, 6 Juni 2007

**Ketua Harian BRA
Muhammad Nur Djuli**

